



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

KOMISI IX DPR RI

**(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BADAN POM, BKKBN, PT. ASKES, PT. JAMSOSTEK, DJSN DAN BNP2TKI)**

Tahun Sidang : 2011-2012
Masa Persidangan : II
Rapat ke : --
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Dengan : Kepala Badan POM
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/tanggal : Kamis, 24 November 2011
Pukul : Pukul 10.00 WIB – selesai
Acara : 1. Membahas rincian penggunaan dana optimalisasi non pendidikan Tahun Anggaran 2012;
2. Penjelasan Badan POM RI terkait upaya intensifikasi pengawasan produk pangan yang beredar di masyarakat;
3. Penjelasan Badan POM RI terkait produk makananyang mengandung formalin dan zat berbahaya yang ditemukan di supermarket tetapi sudah mempunyai sertifikat Badan POM.
Ketua Rapat : Ir. Soepriyatno / Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat : Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1
Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Jumlah Kehadiran : 35 orang anggota, 4 orang izin

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kepala Badan POM dibuka pukul 10.30 WIB, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib pasal 245 ayat (1), rapat dibuka dan dinyatakan *terbuka* untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI menyetujui penggunaan alokasi anggaran tambahan Dana Optimalisasi Non Pendidikan Badan POM RI Tahun 2012 sebesar Rp 150.000.000.000,- (*Seratus Lima Puluh Miliar Rupiah*) dan Tambahan bersumber dari PNPB sebesar Rp 3.101.500.000,- (*Tiga Miliar Seratus Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) untuk program yang berorientasi pada penguatan infrastruktur Laboratorium Badan POM RI agar terwujud keamanan mutu produk obat dan makanan di Indonesia.

2. Komisi IX DPR RI mendorong Badan POM RI untuk melakukan intensifikasi pengawasan produk obat dan makanan melalui metode pengawasan *Pre-Market* dan *Post-Market* berstandar Internasional dengan koordinasi lintas sektor kementerian/lembaga terkait, pemerintah provinsi/kabupaten atau kota dan penegak hukum demi terwujudnya keamanan mutu produk obat dan makanan di Indonesia.
3. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI untuk terus melakukan upaya intensif dan kreatif dalam melakukan pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) yang memenuhi syarat keamanan pangan dengan koordinasi lintas sektor kementerian/lembaga terkait, pemerintah provinsi/kabupaten atau kota.
4. Komisi IX DPR RI mendorong terwujudnya reformasi birokrasi di Badan POM RI terkait dengan tata kelola lembaga sebagai bentuk akuntabilitas Badan POM RI pada masyarakat Indonesia.

Rapat ditutup pukul 13.00 WIB.

Jakarta, 24 November 2011
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI,



Ir. SOEPRİYATNO